

## Pembentukan Stabilitas Politik pada Masa Awal Dinasti Umayyah

**Muhammad Naufan Rizqullah**

Sistem Informasi Uin Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [m.naufan@uinib.ac.id](mailto:m.naufan@uinib.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini mencoba menjelaskan terkait upaya dinasti Umayyah untuk menciptakan situasi stabilitas politik dan pemerintahan pada masa awal berdiri. Pada masa awal setelah diserahkannya kekuasaan Islam kepada Muawiyah bin Abu Sufyan (Ammul Jamaah) yang menandai berdirinya dinasti Umayyah, dibutuhkanlah konsolidasi kekuasaan serta pembuatan budaya politik baru. Hal ini dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaan serta terciptanya sistem pemerintahan Islam yang kuat dan tidak kembali dalam pusaran konflik umat yang berkepanjangan. Objektif kajian ini adalah mencoba melihat pembentukan Sistem Politik di masa awal pemerintahan Dinasti Umayyah khususnya di masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M) dan dilanjutkan kepada anaknya Yazid (680-683 M) sekaligus menandai Perubahan sistem Monarki pertama dalam Islam. Penulis mencoba menjelaskan bahwa pembentukan masa awal tidak lepas dari upaya menjabarkan Sistem Politik yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo terdiri dari 4 Variabel: Kekuasaan, Kepentingan, kebijaksanaan dan Budaya Politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan Sejarah awal pendirian dan pembentukan dinasti Umayyah serta buku-buku berkaitan Teori Sistem Politik sebagai alat analisis terciptanya Stabilitas Politik. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Stabilitas Politik tentu harus ditopang Sistem Politik yang kuat juga, untuk mencapai itu maka dinasti Umayyah harus mengupayakan konsolidasi Politik yang memadai sehingga terciptanya tujuan-tujuan politik Umayyah yang mendapat legitimasi dari seluruh masyarakat Islam saat itu.

**Kata Kunci:** *Stabilitas, Dinasti Umayyah, Sistem Politik, Muawiyah, Politik Islam.*

### Abstract

This article tries to explain the efforts of the Umayyad dynasty to create a situation of political stability and government in the early days of its establishment. In the early days after the handover of Islamic power to Muawiyah bin Abu Sufyan (Ammul Jamaah) which marked the founding of the Umayyad dynasty, it was necessary to consolidate power and create a new political culture. This is needed to perpetuate power and create a strong Islamic government system and not to return to the vortex of protracted ummah conflict. The objective of this study is to try to see the formation of the Political System in the early days of the Umayyad dynasty, especially during the reign of Muawiyah (661-680 AD) and continued to his son Yazid (680-683 AD) as well as marking the first change in the monarchy system in Islam. The author tries to explain that the early formation could not be separated from efforts to describe the Political System described by Miriam Budiardjo consisting of 4 variables: Power, Interests, wisdom and Political Culture. This research is a qualitative research with various sources related to the early history of the establishment and formation of the Umayyad dynasty as well as books related to Political System Theory as an analytical tool for the creation of Political Stability. This study resulted in the finding that Political Stability must of course be supported by a strong Political System as well, to achieve that, the Umayyad dynasty must seek adequate political consolidation so that the creation of Umayyad political goals that received legitimacy from all Islamic society at that time.

**Keywords:** *Stability, Umayyad Dynasty, Political System, Muawiyah, Islamic Politics.*

## PENDAHULUAN

Kajian berkaitan tentang politik Islam dan dimensi yang menaunginya tentu menarik dan tidak pernah habis untuk didiskusikan. Banyaknya penafsiran dari Ulama berkaitan dengan praktik dan teori Politik dalam Islam selalu menjadi diskursus dalam setiap diskusi. Hal ini tercermin dengan terbelahnya pandangan politik Islam dari sisi Doktrinal dan Historial. Dari sisi Sejarah tentu menarik membahas bagaimana Kekhalifahan Dinasti Umayyiah yang menjadi pemimpin masyarakat Islam setelah Khulafaurrasyidin memimpin dan juga ditengah Konflik Umat Islam pasca terbunuhnya 2 khalifah (Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib). Selain itu Kekhilafahan Dinasti Umayyah juga yang merubah metode pemilihan Khalifah yang awalnya Melalui mekanisme Musyawarah menjadi sistem yang lebih Monarki atau Turun-Temurun. Cara Muawiyah memilih anaknya sebagai penerus khalifah adalah hal ini cukup disorot oleh berbagai Sejarawan karena dianggap menyimpang dari pemilihan Khalifah di Era sebelumnya walaupun beberapa sejarawan seperti Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa hal tersebut pernah terjadi di masa Abu Bakar ketika menunjuk Umar walaupun beberapa ulama membantah karena Abu Bakar tidaklah menunjuk Keturunannya. Namun terlepas dari itu semua tentu dalam situasi politik yang tidak menentu dibutuhkan khalifah yang mampu dan dekat dengan kekuasaan sebelumnya agar mampu melanjutkan kekhalifahan Islam yang baru berdiri. Stabilitas Politik inilah yang diharapkan oleh para Aktor politik, pejabat dan sebagian masyarakat untuk melanjutkan perjalanan pemerintahan di masa yang akan datang hal ini tentu ditopang dengan Sistem politik yang memadai dan mendukung penguasa agar leluasa menciptakan stabilitas tersebut.

Banyak Penulis dan Sejarawan telah menuliskan sejarah dan kelangsungan Dinasti Umayyah secara rinci dan Detail. Tulisan berkaitan dengan Kekhalifahan Dinasti Umayyah banyak menyoroti berbagai keberhasilan, keberlangsungan dan kejayaan di masa tersebut. Dalam artikel ini mencoba lebih mendalami masa awal dan pembentukan khususnya di masa Muawiyah (661-680 M) dan dilanjutkan kepada anaknya Yazid (680-683 M). Dalam 2 masa pemerintahan tersebut banyak dicatat bahwa keberlangsungan dinasti Umayyah ini sangat bergantung dari kebijakan—kebijakan yang diterapkan di tengah konflik dan berbagai isu peralihan kekuasaan dan pergantian sistem politik. Penetapan Sistem Politik baru tentu dibutuhkan mengingat rapuhnya kekuasaan Dinasti Umayyah di masa awal karena dihiasi dengan perlawanan dan pemberontakan dari berbagai pihak.

Dari berbagai uraian diatas maka dibutuhkanlah sebuah argumentasi yang mengakui bahwa Dinasti Umayyah mampu menciptakan Sistem politik yang mapan dan mampu mempertahankan kekuasaan yang sudah didapat sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk berkuasa selama mungkin. Hal tersebut juga tidak akan bisa terjadi jika Dinasti Umayyah tidak mendapat dukungan rakyat dan pengkondisian lawan-lawan politiknya. Dalam hal ini penulis mencoba menjabarkan berkaitan Bagaimana Dinasti Umayyah mampu mengurai permasalahan berdasarkan 4 Variabel Sistem Politik Miriam Budiarmo yaitu: Kekuasaan, Kepentingan, Kebijaksanaan dan Budaya Politik (Political Culture).

## METODE

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yang juga mengacu kepada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk inkuiri interpretatif, di mana peneliti membuat interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. Strategi dalam melakukan penelitian kualitatif adalah dengan memfokuskan pada pengumpulan data, analisis, dan penulis (Labolo et al., 2020). Analisis Eksplorasi juga digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terhadap terhadap suatu topik penelitian (Morissan, 2017). Mengenai Penelitian ini penulis berharap mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang skema sistem politik yang dibangun oleh Dinasti Umayyah di masa awal berdiri. Hal ini menjadi penting untuk menjelaskan lebih detail kondisi dan persiapan yang dilakukan oleh Muawiyah dan Yazid untuk mencapai Stabilitas Politik maupun Ekonomi di masa-masa setelahnya.

Dalam mengkaji topik diatas maka dibutuhkan sumber-sumber Primer yang disadur dari Buku Sejarah yang terkemuka salah satunya adalah *History Of the Arabs* karya Philip K. Hitti. Selain itu untuk memperdalam penulis juga menggunakan buku Prof. Dr. Abdussayfi Muhammad Abdul Lathif yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani*

Umayyah. Dalam melakukan Analisis Pembentukan Sistem Politik Penulis menggunakan buku dasar-dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiardjo dalam hal ini menyadur beberapa penjelasan, definisi, ruang lingkup dan Variabel yang menentukan Sistem Politik.

Penulis menggunakan bentuk penelitian pustaka (*library research*), dimana peneliti mengamati objek penelitian melalui bahan pustaka berupa buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan media internet (Labolo et al., 2020). Selain itu Jenis data yang digunakan juga berupa pustaka yang berupaya mengkaji dan menganalisis berbagai teks yang berhubungan dengan terciptanya Stabilitas Politik dan Sistem Politik di masa awal Pemerintahan Kekhalifahan Dinasti Umayyah.

Setiap Penelitian tentu harus memiliki harus bersandarkan dari berbagai penelitian sebelumnya. Hal ini agar dapat memandu penelitian yang dilakukan oleh penulis agar mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran dari penelitian sebelumnya. Maka peneliti mengambil beberapa Pustaka yang dipandang relevan memungkinkan untuk dimasukkan kedalam penelitian ini.

### **Pembentukan Sistem Politik**

Dalam kesempatan ini penulis menjabarkan berkaitan tentang Sistem Politik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran besar terhadap topik. Sistem Politik sendiri pada dasarnya bersifat abstrak namun dapat diterapkan dalam sesuatu bentuk yang bersifat konkret seperti Negara, kesatuan masyarakat ataupun suku bangsa. Hal ini juga merujuk bahwa kebutuhan sistem politik sangat penting untuk berjalannya suatu negara. Robert A. Dahl menggambarkan Sistem Politik sebagai interaksi tetap yang digunakan suatu masyarakat yang juga melingkupi masalah kewenangan, aturan dan juga kekuasaan. Dari pandangan Robert A Dahl kita mendapatkan penjelasan bahwa relasi penguasa dan yang dikuasai sangat erat dengan Sistem Politik yang berlaku di suatu masyarakat baik itu menyakut kebijakan, aturan dan kepatuhan.

Miriam Budiardjo juga memberikan pendapat bahwa Sistem Politik secara Umum mencakup dari 4 Variabel:

- a. Kekuasaan  
Kekuasaan berbicara tentang kemampuan seorang untuk menentukan tindakan dari kelompok lain agar sesuai dan tercapai tujuan dari pihak pertama (Harold & Laswell). Sedangkan Sumber kekuasaannya bisa didapat dari Kedudukan, kekayaan dan kepercayaan.
- b. Kepentingan  
Kepentingan berbicara tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh aktor politik ataupun kelompok politik. Dalam studi ini kepentingan digambarkan dalam bentuk tujuan-tujuan politik penguasa dalam mempertahankan kekuasaan.
- c. Kebijaksanaan  
Kebijaksanaan berbicara tentang hasil dari interaksi kekuasaan dan kelompok kepentingan yang berbentuk peraturan, perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
- d. Budaya Politik  
Budaya politik secara umum mendasarkan kepada sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu sistem politik dalam konteks sebuah negara (Mohd Zain, 2021) . Miriam Budiardjo juga menambahkan bahwa budaya politik tidak lepas dari orientasi Subjektif Individu terhadap sistem politik.

Penulis mencoba menjelaskan bahwa dinasti Umayyah di masa awal tentu harus membangun sebuah Sistem Politik yang memadai agar terciptanya situasi politik yang damai dan aman serta memungkinkan seluruh tujuan kekuasaan dapat dicapai. Tentu membangun sistem politik Islam setelah masa Nabi dan Khulafaurrasyidin tidaklah mudah itupun merubah sistem yang awalnya musyawarah menjadi lebih monarki maka seluruh elemen-elemen dari Sistem politik haruslah dibangun.

### **Awal Berdiri Dinasti Umayyah**

Sejarah awal berdiri Dinasti Umayyah tentu tidak lepas dari konflik yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin

Affan yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali di Bai'at tentu sebagai seorang khalifah adalah melakukan restrukturisasi dengan pejabat-pejabat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang menurut Ali adalah sumber fitnah dan munculnya pemberontakan dan salah satu Gubernur tersebut adalah Muawiyah yang menjabat sebagai Gubernur Syam. Namun upaya yang dilakukan oleh Khalifah Ali menemukan kebuntuan karena penolakan oleh Muawiyah dan warga syam. Bahkan secara terbuka dalam riwayat Ath-Thabari yang dikutip oleh Abdussyafi Muawiyah secara terbuka menolak membai'at Ali menjadi Khalifah dengan alasan bahwa ia menuntut balas atas kematian Pamannya Muawiyah yaitu Utsman bin Affan. Sehingga konflik Ali dan Muawiyah cukup berkepanjangan, masing-masing pihak saling bersikeras terhadap pendapat masing-masing. Situasi dan kondisi yang memburuk ini mengakibatkan Ali memutuskan untuk berangkat ke Syam dan meminta kepatuhan kepada Muawiyah untuk kembali kepada Jamaah Muslim.

Perpecahan tidak dapat dihindarkan lagi sehingga meletuslah 2 Perang yaitu Perang Jamal dan Perang Shiffin. Perang Jamal adalah perang yang melibatkan tentara ali di satu pihak serta Bani Umayyah, Aisyah Istri Nabi Muhammad Saw, dan beberapa sahabat senior yaitu Thalhah dan Az-Zubair. Serta Perang Shiffin antara pasukan Muawiyah dan Pasukan Ali yang berakhir dengan peristiwa Tahkim. Pertempuran Shiffin yang cukup berlarut mengakibatkan Amr Bin Ash meletakkan salinan Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda perundingan dan kembali ke hukum Al-Quran. Perundingan pun terjadi dan dicatat oleh para Sejarawan sebagai Peristiwa Tahkim yang melibatkan Amr bin Ash sebagai perwakilan Muawiyah dan Abu Musa Al-Asyari sebagai perwakilan Ali. Banyak terjadi perbedaan pendapat berkaitan hasil dari Tahkim namun dari beberapa Sejarawan menyimpulkan bahwa Ali dan Muawiyah diturunkan dari kekuasaannya sebagai Khalifah namun khusus untuk Muawiyah ia tidaklah memiliki jabatan maka posisinya hanya diturunkan sebagai Khalifah Fiktif. Hal ini menimbulkan pembelotan (Khawarijj) sehingga sebagian kelompok ini dengan slogan *La hukma illa Allah* merencanakan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin Ash namun hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil dibunuh. Para pendukung Ali mengangkat Hassan bin Ali putra Ali sebagai pengganti.

Hasan bin Ali melihat situasi setelah Tahkim lebih cenderung menguntungkan pihak Muawiyah dan pertimbangan lain Maka Hassan memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah agar bersatunya kembali Umat Islam dalam satu kepemimpinan. Walaupun dalam perundingannya Hassan menyaratkan beberapa hal seperti agar Muawiyah tidak menaruh dendam kepada warga Irak yang notabenenya adalah pendukung Ali serta Jabatan Khalifah setelah Muawiyah agar dikembalikan kepada sistem Musyawarah di antara umat Islam yang dalam hal ini disepakati, namun pun di era setelah ini menimbulkan banyak pertentangan ketika Muawiyah menunjuk anaknya. Muawiyah pun menyambut seruan Hasan dengan datang ke Kufah, kedatangan Muawiyah disambut 2 cucu Nabi: Hasan dan Husain mereka berdua membaiat Muawiyah sebagai Khalifah serta menjadi Tahun persatuan (*Amul-Jamaah*) Umat Islam dan penanda berdirinya Dinasti Umayyah yang dicatat berkuasa selama 92 Tahun kedepannya.

### **Stabilitas Pemerintahan di Masa Muawiyah (661-680 M) dan Yazid (680-683 M)**

#### **1. Masa Muawiyah**

Sebagai pemimpin baru Umat Islam tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh Muawiyah dan yang paling utama adalah menjalankan roda pemerintahan seperti semula layaknya *Khulafaur Rasyidin* di masa lalu. Namun sebelum Muawiyah menjadi Khalifah tentu ia sudah punya bekal pengalaman yang mumpuni salah satunya adalah menjadi Gubernur di Syam yang sudah dijalankan lebih dari 20 Tahun Setelah mendapatkan kekuasaan langsung melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak salah satunya Ahlul Bait yang diwakili oleh Hasan dan Husain. Hasan dan Husain mendapatkan kompensasi dan subsidi dalam berbagai urusan kehidupan. Sikap Muawiyah yang mendekati berbagai pihak salah satunya adalah sahabat Nabi dan juga penduduk Hijaz mendapatkan apresiasi sehingga dimasa-masa lah tidak banyak ditemukan perlawanan dari berbagai pihak. Selain itu untuk memperlancar administrasi pemerintahan Muawiyah juga memindahkan ibukota Islam dari Madinah/Kufah ke Damaskus.

Setelah menyelesaikan permasalahan di Internal maka Muawiyah pun melanjutkan misi dakwah/penaklukan ke berbagai daerah khususnya terhadap romawi timur yang terbiasa menyerang negara Islam di perbatasan. Sehingga pada masa itulah Muawiyah membentuk angkatan perang yang memadai terdiri dari Angkatan darat dan Angkatan Laut. Bahkan tercatat dari angkatan laut dimiliki muawiyah berjumlah 1700 kapal. Di Fase awal ini Muawiyah mengirim pasukan ke perbatasan di Persia yaitu kawasan Transxionia yang cukup dekat dengan Damaskus dan juga wilayah kekuasaan Byzantium. Keberhasilan Operasi militer ini juga membuka berbagai penaklukan di masa-masa yang lain khususnya wilayah Afrika.

## 2. Pengangkatan Yazid sebagai Putra Mahkota

Pengangkatan Yazid sebagai pewaris kekuasaan dan pelanjut Dinasti Umayyah adalah sebuah keputusan yang mengalami pro kontra khususnya dikalangan berbagai Sahabat Nabi, Ahlul Bait dan beberapa kalangan kelompok umat Islam saat itu. Hal ini tidak terlepas dari dianggap menyimpangnya cara pemilihan khalifah yang sebelumnya memakai cara musyawarah di kalangan umat Islam bukan diwariskan secara turun temurun. Riwayat yang paling terkenal ide pengangkatan Yazid sebagai Khalifah pertama kali di usulkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang saat itu hendak dicopot sebagai gubernur Kufah lalu sebagai upaya merebut hati Khalifah kembali maka Mughirah mengusulkan ide tersebut.

Ide tersebut tentu mendapat berbagai pertentangan namun Muawiyah mencoba untuk mengerahkan seluruh kemampuan Politiknya untuk memuluskan ide tersebut. Muawiyah langsung terjun meyakinkan beberapa sahabat Nabi juga mengerahkan beberapa pejabat salah satunya Marwan bin Hakam Gubernur Madinah saat itu yang nanti juga akan menjadi salah satu Khalifah Dinasti Umayyah. Argumentasi yang dikeluarkan oleh Muawiyah adalah sepeninggal Muawiyah nanti akan terjadi perselisihan kembali sehingga Yazid sebagai Khalifah selanjutnya harus disosialisasikan dengan segera khususnya di Madinah dan kalangan sahabat Nabi yang masih hidup.

Namun atas gigihnya upaya Muawiyah meyakinkan beberapa kalangan umat Islam pun ikut membaiai Yazid namun sebagian lagi seperti Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali menolak. Hal ini menjadi penanda berubahnya sistem Politik Islam yang sebelumnya Musyawarah menjadi Monarki.

## 3. Masa Yazid

Terpilihnya Yazid sebagai Khalifah tentu atas jasa besar ayahnya yang mampu meyakinkan umat Islam, pejabat-pejabat serta beberapa sahabat untuk membaiai'atnya. Setelah ayahnya wafat Yazid umat semua bersepakat untuk membaiainya kecuali kedua tokoh yaitu Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair yang dari kedua orang ini akan sedikit banyak berurusan dengan Yazid. Beberapa sahabat pun lebih memilih membaiai Yazid karena lebih mementingkan persatuan Umat Islam itu sendiri.

Namun begitu pemberontakan tidak dapat terelakan bahwa ketidak inginan sebagian masyarakat Islam terhadap kepemimpinan Yazid dan berubahnya sistem Politik yang monarki menjadi alasan perlawanan khusus warga Madinah. Selepas ayahnya wafat Yazid memerintahkan Walikota Madinah untuk meminta baiat atasnya terkhusus Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, namun hal tersebut tidak pernah terjadi. Tragedi tidak terelakan bermula kepada terbunuhnya Husain bin Ali ketika saat mendapatkan Informasi Baiat Khalifah dari warga Kufah dan Yazid mengirim pasukan untuk mencegah itu terjadi. Pasukan yang dikirim Yazid pun tidak bisa menghindarkan peperangan yang meletus dan menyebabkan Husain terbunuh. Selepas itu pemberontakan juga tidak berhenti begitu saja Warga Madinah melakukan deklarasi tidak mengakui pemerintahan Yazid dan mengusir gubernur yang ditunjuk dari kota Madinah. Respon Yazid juga langsung mengirim pasukan untuk mengepung Madinah melalui Al-Harrah utara madinah dan berhasil menaklukkannya. Peristiwa penaklukan Madinah juga banyak dikritik oleh sejarawan muslim karena terjadi penodaan kota suci Madinah yang dilakukan oleh pasukan yang dikirim Yazid tersebut. Setelah berhasil menaklukan Warga Madinah pasukan yang dipimpin Muslim bin Uqbah merubah tujuannya ke Mekkah untuk menyelesaikan pemberontakan Abdullah bin Zubair yang mendapat baiat dari warga Mekkah untuk menjadi Khalifah. Namun dalam



perjalanan Muslim sang pemimpin meninggal dunia. Perang tetap terjadi dengan pemimpin pengganti Al Hushain Lalu ketika perang sedang berkecamuk tersiar kabar wafatnya Yazid sehingga pasukan kembali dengan meninggalkan rusaknya Ka'bah.

Selama pemerintahan Yazid inilah terdapat pesan bahwa pengukuhan kekuasaan Dinasti Umayyah hanya dapat dilakukan dengan penyelesaian terhadap lawan-lawan politik yang dalam hal ini Husain bin Ali, Warga Madinah, dan warga Mekkah walau tetap meninggalkan luka bagi sebagian Umat Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Muawiyah dan Yazid Mengelola Kekuasaan**

Dinasti Umayyah mendapatkan kekuasaan setelah melalui proses penyerahan kekuasaan oleh Hasan yang ditandai dengan berdamainya seluruh pihak dan membaiaat Muawiyah sebagai Khalifah Umat Islam. Tentu kekuasaan berada di tangan yang tepat ketika seorang penguasa mengerti cara menggunakan kekuasaan tersebut. Muawiyah adalah sosok yang sangat tepat menjadi seorang penguasa. Dalam berbagai perspektif keilmuan Kekuasaan tentu tidak lepas dari faktor dominasi bahwa kekuasaan meliputi upaya mencapai tujuan dengan memobilisasi Sumber Daya yang mengarah kepada pengakuan legitimasi yang mampu mendesak keinginan orang lain untuk tunduk sesuai keinginan penguasa. Maka Muawiyah dalam mendapatkan legitimasi berhasil meraih pengakuan dari semua pihak yang bertikai serta mendapat dukungan seluruh masyarakat Islam saat itu. Namun ketika bicara legitimasi kekuasaan yazid tentu tidak semulus sang ayah, ia harus melakukan berbagai upaya meyakinkan berbagai pihak bahkan dengan cara-cara yang kasar untuk memberikan ketegasan bahwa legitimasi kekuasaan adalah miliknya. Tentu hak penguasa juga adalah kemampuan pengadaan sanksi, hal ini menjadi penanda perbedaan dari penguasa dan masyarakat yang dikuasainya.

Dalam hal ini Muawiyah dan Yazid mampu memberikan sanksi yang tegas kepada beberapa pihak yang kurang sepakat, walaupun di masa Muawiyah cukup damai dan terkendali namun tetap ada perlawanan salah satunya dari Hujr bin Adi yang akhirnya dieksekusi karena kritiknya terhadap gubernur pilihan Muawiyah. Yazid yang notabenenya banyak perlawanan karena perubahan sistem monarki melakukan penguatan legitimasinya dengan mengirimkan pasukan kepada para pemberontak dan menghukum dengan memerangi jika ia tidak memiliki kepatuhan. Dilihat dari sisi ini Kekuasaan Muawiyah dan Yazid mendapat tempat yang utuh di masyarakat karena ketegasan sikap serta wibawa kekuasaan yang menyertainya. Pada awal kekuasaan dinasti Umayyah dianggap memiliki praktik Ideal terhadap pandangan Machiavelli karena memiliki kemampuan kontrol dan keberuntungan yang dimiliki oleh pemimpin yang ditandai dengan penerapan monarki, pendirian angkatan bersenjata, peletakan agama dan moral dalam hal yang bersifat pragmatis serta menerapkan politik kepatuhan pada rakyatnya.

### **Dinasti Umayyah dan Tujuan Politik**

Tentu dalam setiap kekuasaan memiliki tujuan politik masing-masing. Dalam studi berkaitan dengan politik tujuan politik digambarkan dalam bentuk kepentingan (Interest). Miriam Budiardjo mencoba menjelaskan kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh para pelaku-pelaku dan kelompok politik. Tentu ambisi kekuasaan dalam skema politik harus diiringi dengan tujuan politik yang terukur dan memungkinkan direalisasi oleh penguasa.

Dinasti Umayyah merancang beberapa Tujuan Politik yang sudah sangat jelas dalam beberapa hal. setelah mendapatkan kekuasaan dinasti Umayyah langsung mendesain agar kekuasaannya kuat dan berlangsung lama. Kekuatan kekuasaan adalah bagaimana meminimalkan segala kerentanan terhadap kekuasaan yang baru berdiri baik dari segi internal maupun segi eksternal. Muawiyah mampu menyelesaikan permasalahan dan kerentanan internal dengan baik sedangkan untuk masalah eksternal juga mampu mengirimkan banyak pasukan untuk mengamankan wilayah Islam yang mendapat ancaman dari Byzantium.

Penerapan hukum di masyarakat juga seringkali sarat terhadap kepentingan dan tujuan politik para elit politik hal ini terjadi di masa Dinasti Umayyah sebagai contoh adalah peraturan memilih Khalifah selanjutnya yang berakhir dengan terpilihnya Yazid sebagai putra mahkota. Khalifah

Muawiyah sudah memahami bahwa menjadikan Yazid sebagai putra mahkota adalah tujuan politik yang harus ditempuh untuk anak-keturunan dan keluarganya terlepas dari banyak pandangan sejarawan bahwa pilihan Muawiyah adalah untuk keamanan dan stabilitas.

Yazid sendiri pun melanjutkan Tujuan politik ini dengan hampir seluruh masa ia berkuasa dihabiskan meyakinkan masyarakat dan menerapkan sanksi bagi yang melawan kebijakan penunjukan Khalifah secara turun temurun. Pondasi legalitas sistem monarki yang dibangun oleh Muawiyah dan Yazid tentu menghadapi tantangan besar dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum mereka selesai berkuasa.

Dalam perspektif lain hal ini juga disebut sebagai Normalisasi Kekuasaan atau pembiasaan dalam tubuh perilaku yang menempatkan kekuasaan sebagai efek dan kendaraan. Dalam perspektif tersebut Muawiyah dan Yazid tentu berupaya bahwa perubahan sistem monarki harus menjadi sebuah kondisi normal yang harus dimaklumi oleh seluruh masyarakat. Upaya normalisasi juga terlihat dari bagaimana meyakinkan para sahabat-sahabat Islam yang terhormat khususnya di daerah Makkah dan Madinah yang cukup mempengaruhi Abdullah Bin Umar yang memilih untuk tidak menentang keputusan tersebut dan mengajak warga Hijaz tidak melawan karena akan terjadi pertumpahan darah.

### **Kebijakan-Kebijakan dalam rangka Stabilitas Politik dan Ekonomi**

Kebijakan pemerintahan adalah bentuk kebijaksanaan penguasa terhadap yang dikuasainya. Easton menjelaskan Kebijakan dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang bersifat mengikat. Kebijakan tentu adalah berbentuk sebuah aturan, fasilitas dan berbagai produk pemerintahan yang ditujukan kepada masyarakatnya.

Kebijakan Dinasti Umayyah dapat dilihat dari berbagai hal yaitu upaya pembangunan dari segi Politik dan Ekonomi. Dari segi Politik Muawiyah dan Yazid berusaha membangun interaksi yang tegas antara kekuasaan yang dimilikinya dan pengaturan secara sistematis untuk yang dikuasainya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pembangunan Politik juga mengarah kepada pembuatan berbagai lembaga-lembaga politik yang menjadi mesin kekuasaan dan tempat terciptanya kebijakan yang langsung sampai kepada masyarakat.

Muawiyah ketika menjabat langsung mengubah pusat ibukota yang berpindah di Damaskus mengingat Syam menjadi daerah kekuasaan nya bahkan sebelum menjadi Khalifah, hal itu sangat strategis mengingat pasukan dan pendukung serta berbagai kemudahan dalam pengaturan kekuasaan biasa dilakukan di Damaskus. Dari segi administrasi Dinasti Umayyah membagi berbagai wilayah yaitu: Hijaz, Yaman, Irak, Al-Jazirah, Syam, Mesir dan Andalusia. Setiap wilayah ditunjuk Gubernur yang memimpin dan juga memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur untuk mengatur wilayah dan bekerja sama demi kemakmuran. Maka ketika kita menemukan praktik administrasi di masa Umayyah banyak hal yang bersifat Desentralisasi. Namun tetap ada upaya pengawasan terhadap kepala daerah jika ditemukan kesalahan maka akan dipecat. Hal ini tercermin ketika Muawiyah mencopot Keponakannya Abdurrahman bin Ummul Hakam dari posisi gubernur Basrah karena mendapatkan informasi atas buruknya akhlak yang terkait. Maka ketepatan memilih Gubernur menjadi sebuah kebijakan yang mampu mengendalikan situasi politik. Hal ini memunculkan banyak nama-nama gubernur yang cerdas di masa Dinasti Umayyah seperti Amr bin Ash, Mughirah bin Syu'bah, Marwan bin Hakam dan di masa Yazid ketika akan menemukan Al-Hajjaj yang dikenal kejam namun mampu menyelesaikan berbagai masalah politik yang dihadapi Dinasti Umayyah.

Dalam aspek ekonomi dinasti Umayyah juga mampu memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Berdirinya Dewan yang bertugas sebagai lembaga negara untuk mengurus urusan administrasi dan masyarakat juga cukup membantu kondisi ekonomi masyarakat.

- a. Diwan *Al-Kharajj* yang mengatur masalah keuangan
- b. Diwan *Al-Barid* yang mengatur pos
- c. Diwan *Al-Khatim* yang mengatur arsip
- d. Diwan *Ar-Rasa'il* yang mengatur surat dan nota kesepakatan
- e. Diwan *Al-Ummal* yang mengatur kepegawaian

Berbicara tentang upaya Muawiyah tentang pembangunan ekonomi salah satunya kecemerlangannya adalah membangun dinas-dinas seperti yang dicantumkan diatas serta kebijakan

gaji pegawai untuk dinas-dinas yang mengurus pelayanan Publik. Diwan Al-kharajj yang mengatur masalah keuangan bertugas mengatur seluruh pemasukan negara berupa Ghanimah, Jizyah (Pajak Tanah), Zakat serta pajak-pajak lain. Selain mengumpulkan uang tentu menyalurkan ke berbagai daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta biaya operasional pemerintahan khususnya gaji pegawai istana, tentara dan berbagai pejabat. Selain itu Dinasti Umayyah juga membangun lembaga peradilan serta kepolisian untuk mengatur keamanan.

Dari berbagai kebijakan diatas upaya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi tampak terlihat. Hal ini membuat kenyamanan masyarakat serta sedikitnya pemberontakan yang timbul. Aparat yang mencakup kepala daerah yang berkompeten serta fasilitas penunjang ekonomi sangat diperhatikan untuk tercapainya Stabilitas.

### **Budaya Politik yang dibangun Dinasti Umayyah**

Salah satu aspek yang juga penting dalam sistem politik adalah terciptanya budaya politik sebagai cerminan penerimaan sesuatu kekuasaan terhadap yang dikuasainya. Budaya politik secara utuh dimaksudkan sebagai pandangan politik yang terdiri atas Norma, pola orientasi dan pandangan hidup. Dari sini penulis melihat bahwa kekuasaan juga harus masuk kedalam alam bawah sadar yang dikuasainya sehingga secara otomatis memaklumi nilai yang diinginkan oleh sang penguasa. Miriam Budiardjo juga menganggap bahwa budaya politik tidak lepas dari dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang termanifestasikan dalam bentuk sikap, sistem kepercayaan dan simbol-simbol. Diakui budaya politik dibentuk dari perkembangan suatu masyarakat yang terpengaruh dari sejarah perkembangan yang hidup suatu masyarakat. Contoh yang paling terasa adalah peran Ulama dan Umara (Pemimpin) yang mulai dipisahkan. Jikalau kita melihat dimasa Khulafaur Rasyidin maka kita kan menemukan bahwa seorang pemimpin juga memiliki pemahaman agama yang mumpuni layaknya Fuqoha. Perubahan tersebut dipertegas dengan urusan agama yang terdiri dari Ulama banyak berpusat di Madinah sedangkan urusan pemerintahan fokus berpusat di Damaskus. Simbol dan Sistem kepercayaan agama di yakinkan oleh bani Umayyah memiliki fokus urusan yang berbeda dengan urusan Pemerintahan. Bahwa kecakapan pemerintahan hanya didapatkan oleh orang-orang yang memang berpengalaman atau ada dalam lingkaran kekuasaan dalam hal ini keluarga Umayyah.

Berkaitan budaya politik yang banyak dicatat para sejarawan adalah upaya “Arabisasi” dalam berbagai aktivitas politik. Di masa Muawiyah luasnya wilayah Islam mengakibatkan butuhnya aturan yang menegaskan bahwa budaya arab harus menjadi rujukan seluruh wilayah Islam. Khususnya menyangkut urusan Diwan Al-Kharajj yang awalnya memakai budaya Persia dan di mesir menggunakan budaya yunani diubah agar menyesuaikan dengan kultur Arab.

### **SIMPULAN**

Setelah membaca berbagai penjelasan dan analisis diatas maka penulis ingin menyimpulkan pembahasan terkait Pembentukan Stabilitas Politik pada masa awal Dinasti Umayyah dalam beberapa hal: **Pertama**, Bahwa Stabilitas masyarakat Islam yang ingin di bangun oleh Dinasti Umayyah tidaklah lepas dari pembentukan sistem Politik yang memadai yang melanggengkan kekuasaan untuk masa yang akan datang khususnya berkaitan perubahan Sistem Musyawarah menjadi Sistem Monarki. Sebuah Sistem Politik yang dijalankan oleh Dinasti Umayyah tentu berbicara dengan pengelolaan Kekuasaan, Penetapan Tujuan Politik, Kebijakan-Kebijakan untuk masyarakat serta pembentukan Budaya Politik. **Kedua**, Dinasti Umayyah mampu memperkuat legitimasi dalam kekuasaan yang baru diraih dengan melakukan berbagai pendekatan baik secara halus maupun Kasar baik kepada teman atau lawan politiknya. Ketegasan dan wibawa dalam berkuasa juga tidak lepas menghiasi pribadi Muawiyah dan Yazid sebagai 2 Khalifah pertama Dinasti Umayyah. **Ketiga**, Berkaitan penetapan Tujuan politik (kepentingan) Dinasti Umayyah juga jelas yaitu keberlangsungan kekuasaan dinasti yang harus bertahan lama, sehingga ada upaya untuk memuluskan kepentingan tersebut baik secara persuasif kepada berbagai pihak ataupun penerapan sanksi jika terjadi penghadangan. **Keempat**, Dalam Penerapan Kebijakan Pemerintah Dinasti Umayyah mampu menetapkan kebijakan dari aspek politik maupun ekonomi. Dari aspek politik pemerintahan Dinasti Umayyah mampu menunjuk berbagai kepala daerah yang berkompeten dan loyal terhadap dinasti Umayyah. Dan tentu Khalifah tidak segan



memecat jika terdapat pelanggaran dan permasalahan di wilayah yang dipimpin. Sedangkan dalam aspek ekonomi pembuatan berbagai lembaga (Diwan-diwan) sangatlah baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang dipimpin. **Terakhir**, Budaya politik Dinasti Umayyah di masa awal berkaitan pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kesatuan di masa Khulafaurrasyidin. Lalu juga upaya Arabisasi dalam setiap aktivitas politik dinasti Umayyah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lathif, Abdussyafi Muhammad Abdul. 2014. Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2008: Gramedia
- Hsb, Sahdin, 2019. Politik Arabisasi Dan Dakwah, Refleksi Perkembangan Dakwah Era Umayyah dan Upaya Kontekstualisasi Dakwah Kontemporer di Indonesia, Perdana Publishing.
- Hassan, Ibrahim Hassan. 2001, Sejarah Kebudayaan Islam 1, Kalam Mulia
- Hassan, Ibrahim Hassan. 2001, Sejarah Kebudayaan Islam 2, Kalam Mulia.
- Hitti, K. Philip. 2018 History Of The Arabs, Zaman
- Dirhamzah, Perkembangan Politik dan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Bani Umayyah, ALHIKMAH VOL. 22 NO. 2 (2020)
- Huda, Nurul Muhammad, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ESTORIA Volume 1, No. 2, April 2021
- Mudhoffir, Mughis Abdil, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18, No. 1, Januari 2013
- Fahrezy, Falah Alvin , Hamid, Al Rizal, Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli (Studi Kasus Dinasti Umayyah), Living Islam: Journal of Islamic Discourses, Vol. 4, No. 2 (Desember 2021)
- Febriansyah, Irawan Ferry, Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang, Perspektif Volume XVII No. 3 Tahun 2012
- Augusta I, Resensi Buku:Teori Kekuasaan, Teori Sosial dan Ilmuwan Sosial, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Vol 2 2008.
- Fauzan, Ali Rasyid , DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam), ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2020)
- Zawiyah Mohd Zain, Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis, GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 2021